

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Kraton Yogyakarta merupakan Kerajaan yang masih Berjaya hingga masa sekarang. Kraton adalah identitas dakwah yang dilakukan oleh para Raja sebagai bentuk dakwah melalui kekuasaan. Begitupula tidak dapat dipungkiri penyebaran Islam di Yogyakarta adalah bentuk dakwah Kraton Yogyakarta. Sultan yang mempunyai peran penting dalam kepemimpinannya di Kraton Yogyakarta. Sultan (raja) juga merupakan identitas Kraton Yogyakarta begitu juga apa saja yang melekat pada Sultan termasuk Gelar. Gelar sendiri merupakan label yang memberikan identitas, jelas bahwa gelar mencerminkan pribadi dan kewajiban seorang Raja. Namun pada tanggal 30 April 2015 Sri Sultan HB X mengeluarkan sabda raja dan berisikan perubahan Gelar. Perubahan gelar tersebut menuai penolakan dari berbagai pihak.

Perubahan gelar sebagai bentuk perubahan budaya di Kraton tersebut dikarenakan adanya faktor kepentingan politik. Faktor kepentingan didukung dengan serangkaian peristiwa seperti pengajuan perubahan UUK. Sri Sultan HB X mempunyai tujuan untuk melanggengkan anak perempuannya yaitu GKR Pembayun untuk menjadi penerusnya. GKR Pembayun juga dianugrahi gelar Mangkubumi, sedangkan gelar Mangkubumi biasanya dianugrahan kepada pangeran mahkota yang akan diangkat sebagai Raja.

Perubahan gelar tersebut mengarahkan ke perubahan budaya di Kraton Yogyakarta. Perubahan gelar tersebut banyak dinilai melupakan sejarah serta mengingkari sumpah yang sudah di ucap saat penobatan menjadi Sri Sultan HB X waktu lalu.

Perubahan budaya berupa beberapa perubahan bagian upacara adat yang biasanya di hadiri oleh Rayi dalem namun digantikan anak perempuan Sri Sultan HB X, dan pawiyatan yang biasanya hanya untuk abdi dalem namun sekarang untuk masyarakat juga. Namun masih banyak unsur tradisi yang masih asli. Kebanyakan unsur fisik seperti bangunan, bahkan lambing Kraton sendiri masih belum berganti.

B. Saran-saran

1. Untuk Kraton Yogyakarta

Saran untuk Kraton Yogyakarta adalah untuk lebih menelisik kembali nilai sejarah dan makna gelar Sri Sultan yang lama sebagai pertimbangan. Pertimbangan untuk mengikuti perkembangan zaman merupakan hal yang baik, akan tetapi perkembangan zaman juga perlu dibatasi agar tidak melupakan Paugeran yang sudah ada.

2. Untuk Lembaga Dakwah

Saran Untuk Lembaga dakwah seperti Muhammadiyah atau NU agar lebih melakukan pendekatan kepada Kraton supaya meminimalisir Perubahan budaya yang terjadi.

3. Untuk DPRD DIY

Saran Untuk DPRD DIY supaya mampu mendampingi suara rakyat yang ingin Gelar dan Legitimasi kekuasaan tidak dilegalkan.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Banyak hal yang belum dilakukan peneliti diantaranya mengetahui detail pendapat Kerabat (adik-adik) yang menolak Perubahan Gelar, serta pendapat tentang gelar Sultan yang baru.